

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Ainur Rizqiyah

STAI Darul Ulum Banyuwangi

rizqy243@gmail.com

Abstract

This article attempts to describe the formulation of educational policies which can be used as reference material in revitalizing the concept of formulating a policy in educational institutions. The term formulation, also known as formulation, is an important step in the decision-making process for a policy. The essence of policy formulation is a way to solve a problem that is formed by policy-making actors in solving existing problems and of the many existing alternative solutions, the best policy alternative is chosen. The components in policy formulation are actors, environment and public policy. As for the process of formulating a policy, especially in Islamic education, there are several stages that can be carried out, including: preparation of the educational agenda, formulation of educational policies, adoption of educational policies, implementation of educational policies, and evaluation of educational policies.

Keywords: *Formulation, Policy, Islamic Education*

Abstrak

Artikel ini berupaya untuk menguraikan tentang perumusan kebijakan pendidikan yang dapat menjadi bahan acuan dalam merevitalisasi konsep perumusan suatu kebijakan pada lembaga pendidikan. Istilah perumusan juga yang dikenal dengan istilah formulasi merupakan salah satu langkah penting dalam proses pengambilan keputusan pada suatu kebijakan. Hakikat dari formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Komponen dalam perumusan kebijakan yaitu pelaku, lingkungan dan kebijakan publik. Adapun proses merumuskan suatu kebijakan khususnya dalam pendidikan Islam, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, antara lain : penyusunan agenda pendidikan, formulasi kebijakan pendidikan, adopsi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: *Perumusan, Kebijakan, Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Kebijakan sebagai modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jika kita melihat sejarah kebelakang, maka kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru karena secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu, analisis kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis dan dapat dirunut sejak adanya peradaban umat manusia. Sejak itu, kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya.

Formulasi kebijakan sebagai tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan agenda setting yang lebih bersifat politis. Proses formulasi kebijakan berdasarkan sistem politik mengandalkan masukan dari tuntutan dan dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan.² Maka dari itu mengingat pentingnya tahapan ini, disini penulis akan membahas terkait Formulasi Kebijakan Pendidikan.

¹Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018),h. 27.

² Bakry Aminuddin, *Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, jurnal MEDTEK, Vol. 2 (1), April 2010.

Hakikat Formulasi Kebijakan

Ketika berbicara hakikat, berarti kita sedang berbicara dasar atau intisari dari topik pembahasan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait inti sari dari formulasi atau perumusan kebijakan.

Sebelum masuk ke arah sana, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwasanya formulasi kebijakan adalah bagian dari tahapan dari proses pembuatan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan tidak lepas dari proses analisis kebijakan, yaitu serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan dalam proses di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat *politis*. Aktivis politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.³

Perumusan (Formulasi) kebijakan merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi.⁴

Formulasi kebijakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan-tahapan kebijakan publik sendiri. Berikut adalah proses kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn⁵:

³William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), h. 22.

⁴Sholih Muadi, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik, Vol. 06 (2), Desember 2016, h. 199.

⁵William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), h.24-25.

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik

Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.	Legilator negara dan co-sponsorsnya menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkannya ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui, atau rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.	Peradilan Negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe.v. Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dari akuntansi dalam pemerintahan menentukan	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti

apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.	bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan adalah tahap perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Definisi formulasi kebijakan menurut beberapa ahli adalah :

Formulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perumusan.⁶ Menurut Dunn, perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.⁷ Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.⁸

Sedangkan menurut James Anderson (dalam Agustino Leo)⁹ menjelaskan bahwa formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?. Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana yang dikutip Subarsono menyatakan bahwa formulasi kebijakan yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.¹⁰

⁶<https://kbbi.web.id/formulasi>, diakses pada 15 Februari 2022 Pkl 14.33 WIB.

⁷William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), h.132.

⁸Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, (Yogyajarta: Media Presindo, 2007).

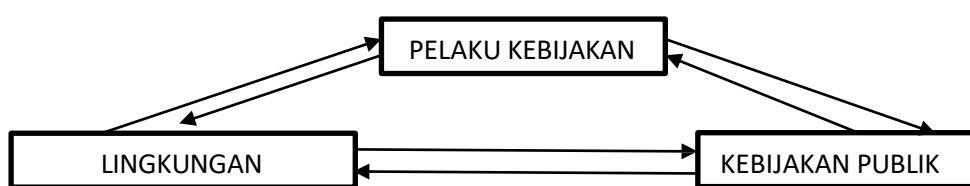
⁹Agustino Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 22.

¹⁰Subarsono, Ab, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 13.

Berdasarkan pengertian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat dari formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Komponen Formulasi Kebijakan

Berbicara komponen, maka disini kita akan membahas unsur atau bagian dari keseluruhan apa saja yang termasuk dalam formulasi kebijakan. Bagan berikut menunjukkan unsur dalam kebijakan publik :



Gambar 2.3 Elemen sistem Kebijakan

Analisis kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak lainnya di dalam sistem kebijakan suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh polainstitusional di mana di dalamnya kebijakan mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan (Gambar 2.3). Kebijakan publik (*public policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah satu bidang isu tersebut terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat. Isu kebijakan yang ada biasanya merupakan hasil konflik definisi mengenai masalah kebijakan. Sebagai contoh, sebagian besar segmen dalam masyarakat memandang kejahatan sebagai isu kebijakan; kejahatan sebagai suatu masalah yang melibatkan nilai-nilai hukum, tatanan, dan keamanan yang tidak terpenuhi yang dapat didefinisikan sebagai masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, atau suatu masalah motivasi individu. Dalam realitasnya, kejahatan merupakan suatu gabungan dari masalah-masalah seperti tuntutan dan bahkan lebih dari itu.

Definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan

(*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih dan para analis kebijakan sendiri -sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramat berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan. Para analis kebijakan, tidak berbeda dari aktor-aktor kebijakan lainnya, merupakan pencipta dan hasil ciptaan sistem kebijakan.¹¹

Proses Formulasi Kebijakan

Proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar (*grand design*) pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan.

Perumusan kebijakan menjadi tahap kritis dari proses kebijakan. Karena terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dihasilkan dari pilihan alternatif utama. Proses ini biasanya mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan, dukungan yang saling tarikmenarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahapan perumusan kebijakan tentu melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merangkai seperangkat pilihan (alternatif) kebijakan untuk mengatasi permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi sebagai persiapan dalam penentuan rumusan kebijakan akhir yang akan ditetapkan.¹²

¹¹William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), h.109-111.

¹²Arwildayanto, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Cendekia Press, 2018), h. 56.

Idealnya proses perumusan kebijakan berkaitan erat dengan proses kerja ilmiah yang meliputi 1) identifikasi dan formulasi masalah kebijakan, 2) penentuan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah 3) pengkajian atau analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan, 4) pelaksanaan kebijakan dan menentukan standar kinerja minimal, 5) evaluasi keberhasilan, dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis dan lain-lain.¹³

Menyusun masalah kebijakan terdiri dari tiga langkah, yaitu: mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah. Tiap-tiap langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi, dan bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas pada perlunya dibuat kebijakan karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Metode menyusun masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara mendalam dan mengsinkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda setting.¹⁴

Perumusan masalah kebijakan, menurut Weimer dan Vinning (dalam Arwildayanto) problem analysis consists of there major steps: 1) Understanding the problem; adalah memahami permasalahan dengan melakukan analisis permasalahan yang dihadapi melalui: menerima masalah (analisis gejala), memilih masalah (analisis kegagalan), memodelkan masalah (identifikasi variabel kebijakan), 2) choosing and explaining relevant policy goal and constraints, adalah melakukan pemilihan masalah, dan pada tahap, 3) choosing a solution method yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Terpenuhinya semua tahapan ini, para analisis bisa melakukan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta untuk menemukan masalah dan memprediksi akibat yang terjadi untuk tahap selanjutnya.¹⁵

¹³Ahnad Hanisy, *Konsep Dasar Analisis Kebijakan*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 2013, Vol. 4 (1), h. 48.

¹⁴Sholeh Munawar, *Analisis Kebijakan Nasional tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Periode 2003-2006 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta: Jurbal Ilmiah Educational Management, 2011, Vol. 2 (1), h. 201.

¹⁵Arwildayanto, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Cendekia Press, 2018), h. 63.

Selanjutnya setelah perumusan masalah kebijakan selesai, dilanjutkan perumusan kebijakan. Lindblom (dalam Arwildayanto) dalam bukunya *The Policy-Making Process* mengemukakan lima tahapan untuk mempelajari perumusan kebijakan pendidikan, antara lain 1) pelajari bagaimana masalah pendidikan itu timbul dan masuk ke dalam agenda acara para pembuat kebijakan pemerintah, 2) pelajari bagaimana khalayak merumuskan masalah pendidikan tersebut untuk pembuatan suatu tindakan, 3) pelajari sikap apa yang diambil oleh anggota legislatif atau lembaga lainnya atas kebijakan pendidikan itu, 4) pelajari bagaimana para pemimpin merapatkan kebijakan pendidikan itu 5) Pelajari bagaimana kebijakan pendidikan itu dievaluasi.¹⁶

Begitu juga dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, antara lain 1) penyusunan agenda pendidikan, 2) formulasi kebijakan pendidikan, 3) adopsi kebijakan pendidikan, 4) implementasi kebijakan pendidikan, dan 5) evaluasi kebijakan pendidikan.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, Hakikat dari formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Komponen formulasi kebijakan yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain dalam menentukan perumusan atau formulasi kebijakan. Sehingga harus bisa diposisikan sebagaimana fungsi dan perannya.

Proses perumusan kebijakan berkaitan erat dengan proses kerja ilmiah yang meliputi 1) identifikasi dan formulasi masalah kebijakan, 2) penentuan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah 3) pengkajian atau analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan, 4) pelaksanaan kebijakan dan menentukan standar kinerja minimal, 5) evaluasi keberhasilan, dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis dan lain-lain.

¹⁶Arwildayanto, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Cendekia Press, 2018), h. 63.

¹⁷ A. Ramdhani & Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, 2017, Vol. 22 (1), h. 7

Daftar Pustaka

- Ab, Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aminuddin, Bakry. (2010). *Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. jurnal MEDTEK Vol. 2 (1).
- Dunn, William N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arwildayanto, dkk. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Cendekia Press.
- Hanisy, Ahnad. (2013). *Konsep Dasar Analisis Kebijakan*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Vol. 4 (1).
<https://kbbi.web.id/formulasi>, diakses pada 15 Februari 2022 Pkl 14.33 WIB.
- Leo, Agustino. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Madjid, Abd. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Muadi, Sholih. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. Jurnal Review Politik. Vol. 06 (2).
- Munawar, Sholeh. (2011). *Analisis Kebijakan Nasional tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Periode 2003-2006 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Jurbal Ilmiah Educational Management. Vol. 2 (1).
- Ramdhani, A. & Ramdhani. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik. Vol. 22 (1).
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.